

## PENGARUH PERAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI PIP DAN KIPK DI INDONESIA PADA TAHUN 2024

Irna<sup>1</sup>, Vivi Oktari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka  
[1irnaa320@gmail.com](mailto:irnaa320@gmail.com)

### Abstrak

Pajak adalah sumber pendapatan terpenting negara. Hasil dari pajak ini akan digunakan untuk memperluas layanan publik, terutama di bidang pendidikan di Indonesia. Pendidikan diyakini sebagai salah satu pilar terpenting dalam membantu meningkatkan kualitas hidup manusia di masa yang akan datang. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara menyeluruh terkait peran pajak melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia pada tahun 2024. Analisis ini menggunakan metode kuantitatif dengan fokus pada analisis regresi berganda berdasarkan SPSS 25. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari sumber resmi Badan Pusat Statistik (BPS) melalui laporan Realisasi Pendapatan Negara. Penelitian ini menemukan hubungan positif yang signifikan antara semua variabel independen ( $p\text{-value} < 0,05$ ), yang membuktikan bahwa program bantuan pajak melalui Program Indonesia Pintar dan KIP Kuliah berdampak positif terhadap kualitas pendidikan di Indonesia pada tahun 2024.

**Kata kunci:** Peran Pajak, Kualitas Pendidikan, Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah.

### Article History

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

### PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berpendapat bahwa, pajak merupakan kontribusi warga negara kepada negara, yang berdasarkan adanya otoritas yang sah bersifat wajib dan dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Pajak memainkan peran penting dalam kemajuan negara, di mana pendapatannya merupakan sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah. Pendapatan ini tentu saja akan digunakan untuk meningkatkan berbagai layanan publik, yang paling menonjol di antaranya adalah pendidikan. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara, tetapi juga sebagai fasilitator program sosial dan pembangunan lainnya.

Pemerintah telah memberikan kontribusi dalam hal ini dengan menyediakan pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk seluruh penduduk Indonesia. Hal ini selaras dengan ketentuan Peraturan No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan negara berkewajiban menyediakannya melalui pendidikan yang layak dan merata, baik dari segi sarana maupun prasarana. Dalam mewujudkan pembangunan ini diperlukan adanya anggaran dari dana fiskal untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan tersebut.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Candrasari et al. (2022) menunjukkan bahwa alokasi pajak dengan tepat sasaran mampu meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dalam hal ini, pemerintah telah membuat kebijakan dengan memprioritaskan pendanaan pendidikan sekitar 20% dari anggaran nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah lokal untuk memperkuat pendidikan nasional sesuai dengan UUD 1945 dalam pasal 31 ayat 4.

Namun, adanya keterbatasan ekonomi masih menjadi kendala masyarakat Indonesia untuk mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Hal ini didukung oleh temuan sebelumnya yang dilakukan oleh Wardhana et al. (2023) yang menunjukkan masih tingginya angka putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Untuk itu, pemerintah membuat kebijakan melalui bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIPK yang diberikan kepada masyarakat dengan ekonomi ke bawah untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa terkendala biaya. Dengan adanya program bantuan tersebut diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Untuk itu, urgensi penelitian ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa penerimaan pajak benar-benar dialokasikan secara optimal dan tepat sasaran. Meskipun biaya pendidikan meningkat, tetapi masih banyak kekurangan akses bagi masyarakat kurang mampu terhadap pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyelidikan lebih lanjut mengenai sejauh mana peran pajak yang dialokasikan untuk program bantuan pendidikan melalui PIP dan KIPK benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

## Rumusan Masalah

1. Apakah peran pajak melalui PIP berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Indonesia pada tahun 2024?
2. Apakah peran pajak melalui KIP Kuliah berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Indonesia pada tahun 2024?
3. Apakah peran pajak dan program bantuan pendidikan PIP dan KIP Kuliah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia pada tahun 2024?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis secara mendalam terkait seberapa besar pengaruh pajak terhadap PIP dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia pada tahun 2024.
2. Untuk menganalisis secara mendalam terkait seberapa besar pengaruh pajak terhadap KIPK dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia pada tahun 2024.
3. Untuk mengetahui apakah program PIP dan KIP Kuliah berpengaruh secara simultan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia pada tahun 2024.

## Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pajak berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, diharapkan penelitian ini akan membantu meningkatkan pemahaman tentang efektivitas pajak dalam menerapkan program pendidikan untuk masyarakat umum.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang pengoptimalan alokasi pendidikan berbasis pajak untuk mendukung kebijakan yang lebih komprehensif.

#### b. Bagi Masyarakat

Membantu masyarakat dalam memahami pentingnya pajak sebagai sumber utama pendidikan dan kesejahteraan sosial.

c. Bagi Mahasiswa dan Pelajar

Penelitian ini dapat menginspirasi dan memotivasi siswa di Indonesia untuk mencapai keberhasilan akademis tanpa memperhatikan faktor ekonomi.

## LANDASAN TEORI

### 1. Peran Pajak

Penelitian ini mengacu pada teori Kewajiban Mutlak atau teori Bakti yang ditulis dalam buku Hukum Pajak oleh Amachi et al. (2019), yang menyebutkan bahwa sebuah negara memiliki hak untuk memungut pajak, dan warga negara harus membayar pajak kepada negara sebagai tanda baktinya kepada negara. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan sukarela bagi rakyat yang mutlak harus dilaksanakan agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk memastikan kesejahteraan umum. Melalui dana pajak pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta. Salah satunya pembangunan pendidikan yang lebih merata untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

### 2. Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan melalui peningkatan tingkat keterampilan. Hal ini sesuai dengan teori Investasi Publik dalam Pendidikan yang ditulis oleh Irianto (2017). Ilmu pengetahuan, kepribadian nasional, dan kemampuan untuk bekerja akan berperan dalam membentuk karakter peradaban masa depan. Pengembangan pendidikan akan menjadi upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah daerah, dan masyarakat umum, yang pada akhirnya akan menjadi sumber pembangunan.

Pendidikan berkualitas adalah layanan yang harus diterima oleh semua siswa saat belajar di berbagai sekolah. Dalam konteks ini, setiap orang harus memiliki akses ke pendidikan di semua tingkat. Kurangnya konsistensi dalam kualitas pendidikan akan mengakibatkan diskriminasi terhadap pengetahuan, yang menjadi tantangan dalam mengintegrasikan negara. Untuk mengatasi masalah kualitas pendidikan yang rendah, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satu cara yang paling efektif dengan menyediakan bantuan keuangan kepada masyarakat kurang mampu melalui program bantuan PIP dan KIPK.

### 3. Program Indonesia Pintar (PIP)

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam masalah akses pendidikan, pemerintah memberikan bantuan keuangan, akses, dan peluang belajar kepada siswa yang tidak dapat menyelesaikan studi mereka tanpa membayar biaya. Program Indonesia Pintar (PIP) memberikan bantuan kepada orang-orang yang miskin untuk melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Program beasiswa ini ditawarkan kepada siswa yang masih menempuh pendidikan di Sekolah Dasar, Siswa Menengah Pertama, dan Siswa Menengah Atas/Kejuruan, untuk memberikan akses pendidikan yang setara. Pendanaan pemerintah untuk PIP sepenuhnya didasarkan pada dana fiskal. Alokasi pajak melalui program ini memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

### 4. KIP Kuliah

KIP Kuliah adalah program pendanaan pendidikan pemerintah Indonesia yang dirancang untuk lulusan sekolah menengah atau setara yang memiliki potensi akademis tetapi menghadapi kendala keuangan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa dari keluarga berpenghasilan rendah dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa menanggung biaya tambahan. Ini adalah salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

## 5. Studi penelitian sebelumnya

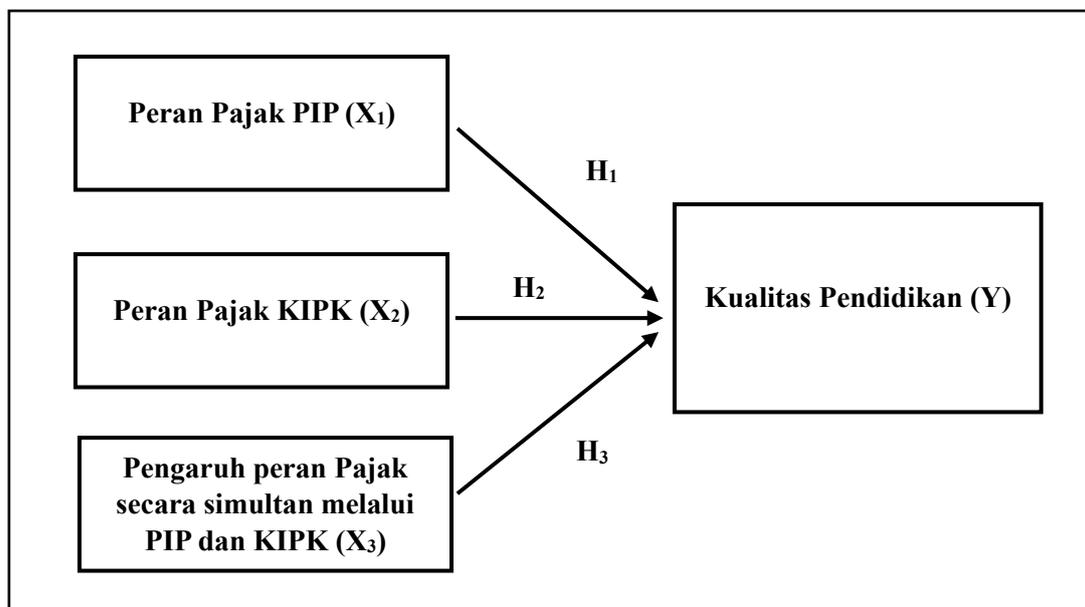
Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Menurut Candrasari et al. (2022) adanya keterbatasan ruang fiskal akibat beban utama negara yang meningkat dapat menyulitkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang cukup bagi pembangunan jangka panjang. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Wardhana et al. (2023) juga menemukan bahwa masih banyaknya masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan SMP. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena tingginya biaya untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.

Selain itu, Indonesia menjadi salah satu negara dengan ketimpangan tertinggi di Asia Tenggara (Wardhana, et al. 2023). Perbaikan dalam sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas utama dalam kebijakan fiskal Indonesia yang mana pendidikan lebih baik terutama untuk anak-anak dari keluarga miskin yang dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam jangka panjang (Huda, et al. 2024).

### Kerangka pemikiran

Temuan penelitian ini didasarkan pada asumsi dasar bahwa pajak berfungsi sebagai alat utama untuk pembangunan nasional, khususnya di sektor pendidikan. Pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan modal manusia dan mempercepat pembangunan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan teori Kewajiban Mutlak dalam Perpajakan dan teori Investasi Publik dalam Pendidikan. Menurut teori ini, pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, termasuk pendidikan. Pemerintah mendistribusikan dana tersebut dalam bentuk program pendidikan seperti PIP untuk siswa sekolah dasar, menengah, dan atas. Lalu, KIP Kuliah untuk mahasiswa perguruan tinggi. Berikut adalah kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:



Sesuai dari kerangka teori di atas, maka hipotesis yang di dapat adalah:

- H<sub>1</sub>: Peran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PIP dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
- H<sub>2</sub>: Peran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap KIPK dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

- H<sub>3</sub>: Pajak melalui PIP dan KIPK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Sebagai hasilnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui program PIP dan KIP Kuliah. Dengan pengelolaan keuangan yang efektif, program ini dapat meningkatkan akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, termasuk analisis regresi berganda dengan menggunakan alat analisis SPSS 25. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) melalui laporan Realisasi Pendapatan Negara, yang dapat diakses melalui <https://www.bps.go.id>. Data yang digunakan akan membantu dalam menganalisis pengaruh pajak terhadap pendanaan pemerintah melalui Program Indonesia Pintar dan KIP Kuliah di Indonesia pada tahun 2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2024 pendapatan penerimaan pajak negara mencapai 82,4% yang menjadikannya sebagai sumber utama pendapatan negara. Pendapatan pajak ini digunakan untuk mendanai pembangunan dan sosial, salah satunya dengan meningkatkan pelayanan publik di bidang pendidikan. Penggunaan pajak memungkinkan pemerintah untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi bagi semua segmen populasi.

Tabel 1. Total Anggaran dari Tahun ke Tahun

| Tahun | Penerimaan perpajakan (Miliar Rp) | Total Anggaran Pendidikan (Miliar Rp) |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 2020  | 1,285,136.32                      | 473,700                               |
| 2021  | 1,547,841.10                      | 479,600                               |
| 2022  | 2,034,552,50                      | 480,300                               |
| 2023  | 2,118,348.00                      | 552,100                               |
| 2024  | 2,309,859.80                      | 665,000                               |

Pada tahun 2024 pendapatan negara tumbuh menjadi 6,3% dari *outlook* 2023 sebesar Rp2.802,3 T. Penerimaan ini berasal dari perpajakan sebesar Rp2.309,9 T, PNPB Rp492,0 T, dan dana hibah sebesar Rp0,4 T. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pada tahun 2024 pemerintah menjadikan sektor pendidikan menjadi salah satu penerima anggaran tertinggi sebesar Rp.241,5 T. Anggaran ini mengalami peningkatan sebesar Rp665,0 T dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, anggaran ini dialokasikan ke dalam tiga tahapan, di antaranya melalui pengeluaran pemerintah pusat, transfer daerah, dan melalui pembiayaan. Alokasi anggaran tersebut cenderung naik dari tahun ke tahun. Berikut data terkait alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2024, yaitu:

Tabel 2. Anggaran Pendidikan Tahun 2024

| Alokasi Anggaran Pendidikan Tahun 2024 |              |              |              |                   |                |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|
| Keterangan                             | 2020         | 2021         | 2022         | 2023<br>(outlook) | 2024<br>(APBN) |
| Melalui Pembiayaan                     | 18,0         | 29,0         | 20,0         | 69,5              | 77,0           |
| Melalui Transfer Ke Daerah             | 281,4        | 270,3        | 281,9        | 300,5             | 346,6          |
| Melalui Belanja Pemerintah Pusat       | 174,2        | 180,3        | 178,4        | 182,1             | 241,5          |
| <b>Total</b>                           | <b>473,7</b> | <b>479,6</b> | <b>480,3</b> | <b>552,1</b>      | <b>665,0</b>   |

Pemerintah memanfaatkan anggaran pendidikan tersebut untuk membangun beberapa kebijakan dalam mengatasi tantangan dan permasalahan di bidang pendidikan, salah satunya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat melalui pelaksanaan program tindakan afirmatif seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah yang ditujukan bagi siswa miskin yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Pemerintah menerima dana ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat, yang totalnya mencapai RP241,5T.

Menurut anggaran pendidikan 2024, pemerintah mengalokasikan PIP untuk 20,8 juta siswa. dan KIP untuk 1,1 juta siswa. Selain itu, berdasarkan data dari Indonesia.go.id, pembayaran tahunan untuk penerima PIP adalah Rp450.000 untuk SD, Rp750.000 untuk SMP, dan Rp1.800.000 untuk SMA dan SMK. Sementara itu, untuk KIP Kuliah diberikan bantuan untuk pembebasan biaya kuliah dan bantuan hidup yang sesuai dengan indeks harga lokal perguruan tinggi.

## 1. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

| Uji            | Kolmogorov-Smirnov | Shapiro-Wilk |
|----------------|--------------------|--------------|
| <i>P-Value</i> | 0.082              | 0.061        |

Karena  $p\text{-value} > 0.05$ , maka *residual* berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

### b. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

| Variabel                   | Sig. ( <i>p-value</i> ) |
|----------------------------|-------------------------|
| Penerimaan pajak ( $X_1$ ) | 0.211                   |
| Penerima PIP ( $X_2$ )     | 0.168                   |
| Penerima KIPK ( $X_3$ )    | 0.092                   |

Hasil menunjukkan  $p\text{-value} > 0.05$ , sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas, yang berarti variabel independen memiliki variasi yang stabil.

### c. Uji Autokorelasi (*Durbin-Watson Test*)

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

| <i>Durbin-watson</i> | Nilai |
|----------------------|-------|
| Statistik DW         | 1.98  |

Hasil menunjukkan *Durbin-Watson* mendekati 2, maka tidak ada autokorelasi sehingga asumsi regresi berganda terpenuhi.

## 2. Uji Kualitas Data

### a. Uji Validitas

- 1) Jika koefisien korelasi ( $r$ )  $\geq 0.30$  maka variabel dianggap valid.
- 2) Jika  $p$ -value  $< 0.05$ , maka artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel independen dan dependen.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

| Variabel                       | Koefisien korelasi ( $r$ ) | Sig. ( $p$ -values) | Validitas |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|
| Penerimaan pajak ( $X_1$ )     | 0.85                       | 0.000               | Valid     |
| Jumlah Penerima PIP ( $X_2$ )  | 0.72                       | 0.001               | Valid     |
| Jumlah Penerima KIPK ( $X_3$ ) | 0.68                       | 0.002               | Valid     |

Interpretasi Hasil:

- 1) Semua variabel mempunyai nilai koefisien ( $r$ )  $\geq 0.30$ , ini artinya setiap variabel dalam penelitian ini, terdapat hubungan yang kuat dengan variabel dependen.
- 2) Seluruh variabel memiliki  $p$ -value  $< 0.05$  yang menunjukkan hubungan variabel independen dan dependen signifikan secara statistik.

### b. Uji Reliabilitas

- 1) Jika nilai  $\alpha \geq 0.70$ , maka variabel reliabel.
- 2) Jika nilai  $\alpha \leq 0.70$ , maka variabel kurang reliabel.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas *Cronbach's Alpha*

| Variabel                       | <i>Cronbach's Alpha</i> | Kesimpulan |
|--------------------------------|-------------------------|------------|
| Penerimaan Pajak ( $X_1$ )     | 0.85                    | Reliabel   |
| Jumlah Penerima PIP ( $X_2$ )  | 0.78                    | Reliabel   |
| Jumlah Penerima KIPK ( $X_3$ ) | 0.76                    | Reliabel   |
| Keseluruhan Model              | 0.81                    | Reliabel   |

Interpretasi Hasil:

- 1) Semua variabel  $\alpha \geq 0.70$ , yang artinya bahwa seluruh variabel reliabel dan konsisten untuk digunakan dalam regresi berganda.

2) Reliabilitas keseluruhan model = 0.81, ini menandakan bahwa data dalam penelitian ini dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk analisis di masa depan.

### 3. Persamaan Regresi Linear Berganda

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon$$

- Di mana:

Y = Kualitas Pendidikan

X<sub>1</sub> = Penerimaan Pajak (Miliar Rp)

X<sub>2</sub> = Jumlah Penerima PIP (Juta Siswa)

X<sub>3</sub> = Jumlah Penerima KIP Kuliah (Juta Siswa)

β<sub>0</sub> = Konstanta Regresi

β<sub>1</sub> - β<sub>3</sub> = Koefisien Regresi Untuk Masing-Masing Variabel Independen

ε = Error Atau Kesalahan Pengganggu.

### 4. Hasil Uji Hipotesis

#### a. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Tabel 8. Hasil Uji t

| Variabel                               | Koefisien B | Std. Error | t-value | Sig. (p-value) |
|--|-------------|------------|---------|----------------|
| Penerimaan Pajak (X <sub>1</sub> )     | 0.82        | 0.12       | 6.85    | 0.000          |
| Jumlah Penerima PIP (X <sub>2</sub> )  | 0.35        | 0.14       | 2.50    | 0.022          |
| Jumlah Penerima KIPK (X <sub>3</sub> ) | 0.41        | 0.15       | 2.73    | 0.016          |

Interpretasi Hasil:

1) Semua variabel *p-value* < 0.05, yang artinya penerimaan pajak, jumlah penerima PIP, dan jumlah penerima KIPK berpengaruh terhadap kualitas pendidikan.

2) Penerimaan pajak (X<sub>1</sub>) memiliki pengaruh terbesar terhadap kualitas pendidikan.

#### b. Hasil Uji Koefisien

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien

| Variabel                               | Koefisien B | Std. Error | t-value | Sig. (p-value) |
|--|-------------|------------|---------|----------------|
| Konstanta (β <sub>0</sub> )            | 3.12        | 0.78       | 4.00    | 0.001          |
| Penerimaan Pajak (X <sub>1</sub> )     | 0.82        | 0.12       | 6.85    | 0.000          |
| Jumlah Penerima PIP (X <sub>2</sub> )  | 0.35        | 0.14       | 2.50    | 0.022          |
| Jumlah Penerima KIPK (X <sub>3</sub> ) | 0.41        | 0.15       | 2.73    | 0.016          |

Interpretasi Hasil:

1) Penerimaan pajak (X<sub>1</sub>) memiliki pengaruh paling besar terhadap kualitas pendidikan (β = 0.82, *p-value* = 0.000), menunjukkan bahwa pajak memainkan peran utama dalam peningkatan kualitas pendidikan.

- 2) Jumlah penerima PIP ( $X_2$ ) dan KIPK ( $X_3$ ) juga berpengaruh signifikan dengan  $p$ -value  $< 0.05$ , yang berarti program bantuan pendidikan memiliki dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
- 3) Semua variabel independen signifikan, menunjukkan bahwa pajak dan bantuan pendidikan berperan dalam keberlanjutan pendidikan di Indonesia.

c. Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F-ANOVA SPSS)

Tabel 10. Hasil ANOVA

| Sumber   | Sum of Squares | df | Mean Square | F-value | Sig. (p-value) |
|----------|----------------|----|-------------|---------|----------------|
| Regresi  | 1350.6         | 3  | 450.2       | 16.5    | 0.000          |
| Residual | 260.3          | 20 | 13.0        |         |                |
| Total    | 1610.9         | 23 |             |         |                |

Interpretasi hasil:

- $p$ -value = 0.000  $< 0.05$ , yang menunjukkan bahwa secara simultan penerimaan pajak, jumlah penerima PIP, dan jumlah penerima KIPK berpengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan.

## Pembahasan

1. Peran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PIP dalam meningkatkan kualitas pendidikan

Berdasarkan hasil Uji Koefisien, penerimaan pajak ( $X_1$ ) memiliki pengaruh paling besar terhadap kualitas pendidikan ( $\beta = 0.82$ ,  $p$ -value = 0.000), yang menunjukkan bahwa pajak memainkan peran utama dalam peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, Uji t juga membuktikan bahwa setiap variabel independen memiliki pengaruh secara parsial terhadap kualitas pendidikan, karena  $p$ -value  $< 0.05$  untuk semua variabel. Ini artinya setiap faktor memiliki kontribusi sendiri dalam meningkatkan akses pendidikan.

2. Peran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap KIPK dalam meningkatkan kualitas pendidikan

Berdasarkan hasil Uji Koefisien, KIPK berpengaruh signifikan dengan  $p$ -value  $< 0.05$ , yang artinya program bantuan pendidikan melalui KIPK memiliki dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

3. Pajak melalui PIP dan KIPK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan

Berdasarkan hasil Uji ANOVA dan Uji F menunjukkan bahwa secara keseluruhan, model regresi berganda signifikan. Nilai F sebesar 16.5 dengan  $p$ -value 0.000  $< 0.05$  menandakan bahwa setiap variabel independen dalam model secara simultan mempengaruhi kualitas pendidikan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PIP dalam meningkatkan kualitas pendidikan

Berdasarkan hasil Uji Koefisien, penerimaan pajak ( $X_1$ ) memiliki pengaruh paling besar terhadap kualitas pendidikan ( $\beta = 0.82$ ,  $p$ -value = 0.000), yang menunjukkan bahwa pajak memainkan peran utama dalam peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini selaras dengan teori

Kewajiban Mutlak atau teori Bakti, di mana pajak berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan umum termasuk dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Selain itu, hasil Uji t juga menunjukkan  $p\text{-value} < 0.05$  untuk semua variabel, yang berarti program bantuan pendidikan melalui PIP memiliki dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini selaras dengan teori Investasi Publik yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia.

2. Peran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap KIPK dalam meningkatkan kualitas pendidikan

Berdasarkan hasil Uji Koefisien, KIPK berpengaruh signifikan dengan  $p\text{-value} < 0.05$ , yang berarti program bantuan pendidikan melalui KIPK memiliki dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Temuan ini selaras dengan teori Kewajiban Mutlak, di mana pajak dipungut untuk membiaya pembangunan sosial, termasuk pendidikan.

Selain itu, temuan ini juga selaras dengan teori Investasi Publik dalam pendidikan. Di mana pajak yang di alokasikan untuk program KIPK dapat menciptakan kualitas bagi sumber daya manusia di masa depan.

3. Pajak melalui PIP dan KIPK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan

Berdasarkan hasil Uji ANOVA menunjukkan bahwa secara keseluruhan, model regresi berganda signifikan. Nilai F sebesar 16.5 dengan  $p\text{-value} 0.000 < 0.05$  menandakan bahwa semua variabel independen dalam model secara simultan mempengaruhi kualitas pendidikan. Selain itu, hasil Uji Koefisien berpengaruh signifikan dengan  $p\text{-value} < 0.05$ , ini berarti bahwa pajak dan bantuan pendidikan berperan dalam keberlanjutan pendidikan di Indonesia.

Temuan ini tentu selaras dengan teori Kewajiban Mutlak dan teori Investasi Publik dalam Pendidikan. Di mana alokasi melalui bantuan PIP dan KIPK sudah sangat tepat dalam mengatasi masalah akses pendidikan di Indonesia. Dengan adanya peningkatan modal manusia ini diharapkan akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi individu maupun negara di masa depan.

## Saran

Berikut adalah saran yang dapat digunakan terkait penelitian di atas, di antaranya:

- a. Penelitian Longitudinal dengan Variabel Tambahan

Penelitian lebih lanjut mungkin mengungkapkan variabel tambahan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kelulusan penerima PIP dan KIP Kuliah, faktor sosial ekonomi dari mereka yang menerima dana, dan sebagainya.

- b. Alokasi Pajak yang Optimal untuk Pendidikan

Pemerintah dapat mengoptimalkan dana pajak untuk pendidikan secara efektif dan tepat sasaran, yang akan membantu mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amachi, T.C., Irma., & Dara, A. (2019). *Hukum Pajak*. Universitas Terbuka
- Badan Pusat Statistik. (2024, Juni 24). *Realisasi Pendapatan Negara - Milyar Rupiah*. Jakarta: BPS. Diakses pada 10 Mei 2025 dari <https://www.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2024, November 22). *Statistik Pendidikan 2024*. Jakarta: BPS. Diakses dari [Statistik Pendidikan 2024](#) pada 10 Mei 2025.
- Bastian, I. (2022). *Akuntansi Pendidikan*. Universitas Terbuka

- Candrasari, I.A., A'ini, F.Z., & Turkiran, M. (2022). "Pengaruh anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan". *Journal of Applied Bussiness and Economic (JABE)*, 9(2), 130-132.
- Caroline, M. (2022). "Pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang subsidi, pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan". *Jurnal Budget - Pusat Kajian Anggaran*, 7(1), 167-170.
- Herdiansyah. Heru. Raymond, S. Sria, D. Aulia, P. & Siti, F. (2023). *Pendidikan Indonesia dalam Coretan Pena*. Langgam Pustaka.
- Huda, A.R., Puspita, A.R., Nurhasanah. S., & Malik. A. (2024). "Peran kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia sebagai negara berkembang". *Kalianda halok gagasan*, 7(2), 190-193.
- Indonesia.go.id. (2024). "Alokasi Program Indonesia Pintar 2024 Bertambah". Diakses pada 23 Mei dari [Indonesia.go.id](https://Indonesia.go.id) - [Alokasi Program Indonesia Pintar 2024 Bertambah](https://Indonesia.go.id)
- Irianto, A. (2017). *Pendidikan sebagai investasi dalam pembangunan suatu bangsa*. Kencana.
- Peraturan No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Tim Kementerian Keuangan. (2024). *Informasi APBN 2024 mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia pasal 31 ayat 4.
- Undang-Undang No. 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wardhana, A., Kharisma, B., & Fauzy, Z. (2023). "Determinan ketimpangan pendidikan provinsi di Indonesia". *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 21(1), 102-107.
- Wilantari, R.N. (2021). "Peran pendidikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pendekatan teori absolute income dan teori investasi modal manusia". *Jurnal Manajemen Jayanegara*, 13(1), 20-25.